



**PEMERINTAH  
KOTA MALANG**

# **PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA MALANG**

PEMERINTAH  
KOTA MALANG



**VISI**



**M**

**I**

**S**

**I**



right size design



Perangkat Daerah



PROGRAM KEGIATAN



**OUTPUT:  
LAYANAN  
MEMUASKAN,  
PRODUK  
BERKUALITAS**

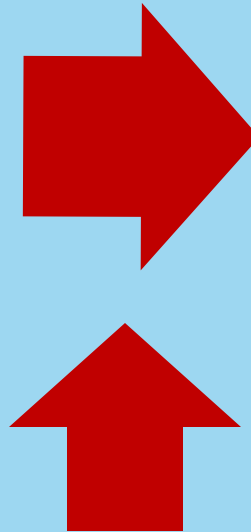


# PRINSIP DASAR KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH

## Kondisi saat ini

***Fragmented  
Organization***

- Prioritas Nasional/Daerah (RPJP/RPJMN/I/RPJMD)
- Visi dan Misi Presiden/Kepala Daerah Terpilih



## Kondisi diharapkan

***Consolidated  
Organization***

- Prioritas Program (Renstra)
- Visi dan Misi Perangkat Daerah (operasionalisasi misi Kepala Daerah)

# DASAR

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ;

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

PERATURAN MENTERI /PIMPINAN LEMBAGA TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR  
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

# URUSAN PEMERINTAHAN (UU 23 TAHUN 2014)

## ABSOLUT

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL

## KONKUREN

WAJIB (24)

PILIHAN (8)

YAN DASAR (6)

NON YAN DASAR (18)

## URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. PANCASILA, UUD45, BHINEKA TUNGGAL IKA, KEUTUHAN NKRI.
2. PERSATUAN DAN KESBANG
3. KERUKUNAN ANTAR SUKU, INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS DAN GOLONGAN
4. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
5. KOORDINASI PELAKSANA TUGAS ANTAR INSTANSI
6. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA
7. PELAKSANAAN URUSAN YG BKN KEWENANGAN DAERAH

# URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

WAJIB

**berkaitan dengan pelayanan dasar**

1. Pendidikan;
2. kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. sosial;

**tidak berkaitan dengan pelayanan dasar**

1. tenaga kerja;
2. pembrdyn permpn. dan perld. anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. Adm. Kependdkn. dan penctn . sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengemdalian penduduk dan KB;
9. Perhubungan
- 10.komunikasi dan informatika;
- 11.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12.penanaman modal;
- 13.kepemudaan dan olah raga;
- 14.statistik;
- 15.persandian;
- 16.kebudayaan;
- 17.Perpustakaan; dan
- 18.kearsipan;

PILIHAN

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumberdaya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

# HUBUNGAN ANTARA KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN) DENGAN KELEMBAGAAN

**Kewenangan merupakan Dasar terbentuknya kelembagaan**



**Kelembagaan merupakan Wahana untuk melaksanakan kewenangan**

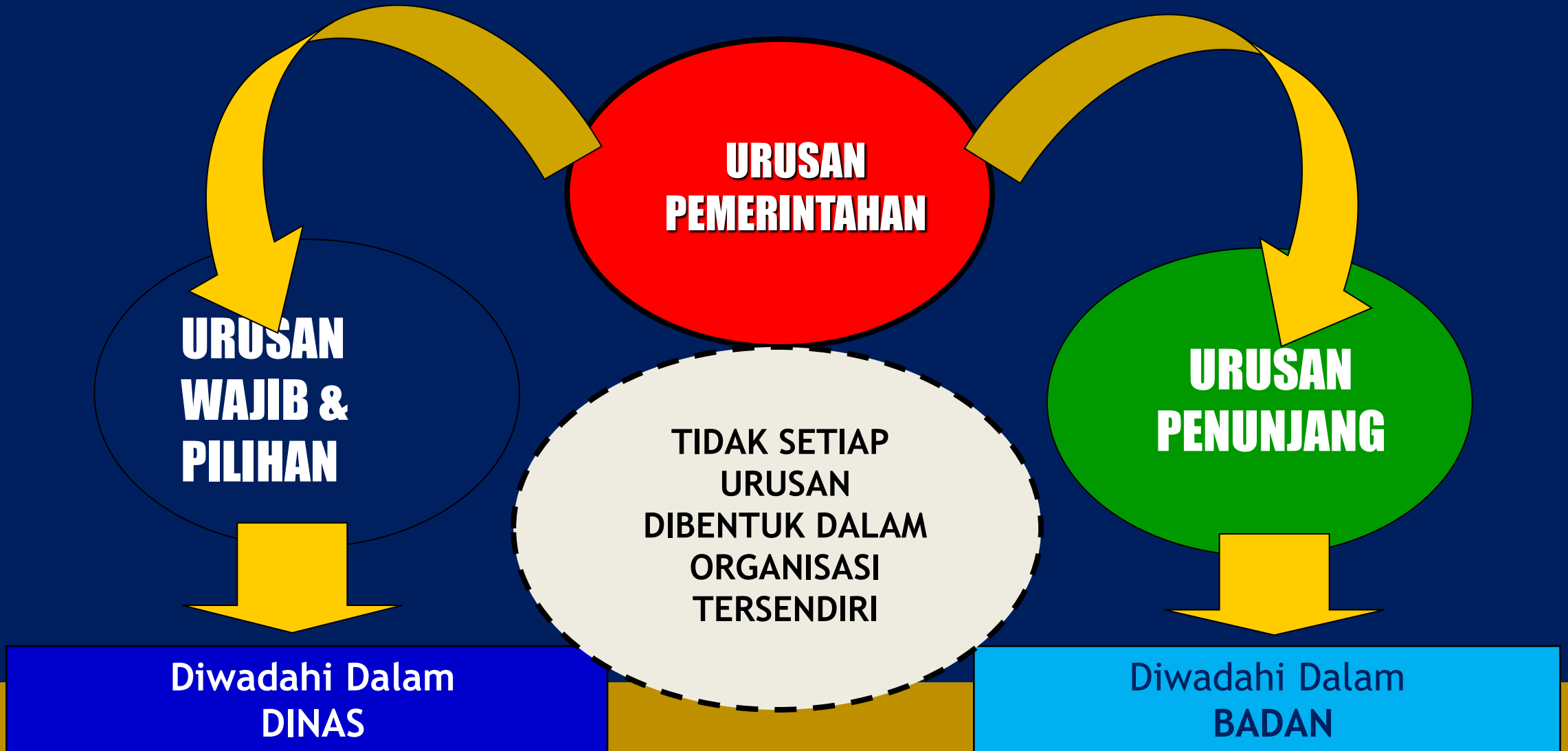


**Kelembagaan yang dibentuk Sama dengan bobot Kewenangan Yang dimiliki**



**Prinsip "Structure follows function"**

# DASAR PENYUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH





# PENGATURAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM UU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

**UU 32/2004**

**UU 23/2014**

**Psl. 120 s.d Psl. 128 :**

**Perangkat Daerah Kab/Kota:**

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah;
- d. Lembaga Teknis Daerah;
- e. Kecamatan;
- f. Kelurahan.

**•Psl. 209:**

**Perangkat Daerah Kab/Kota:**

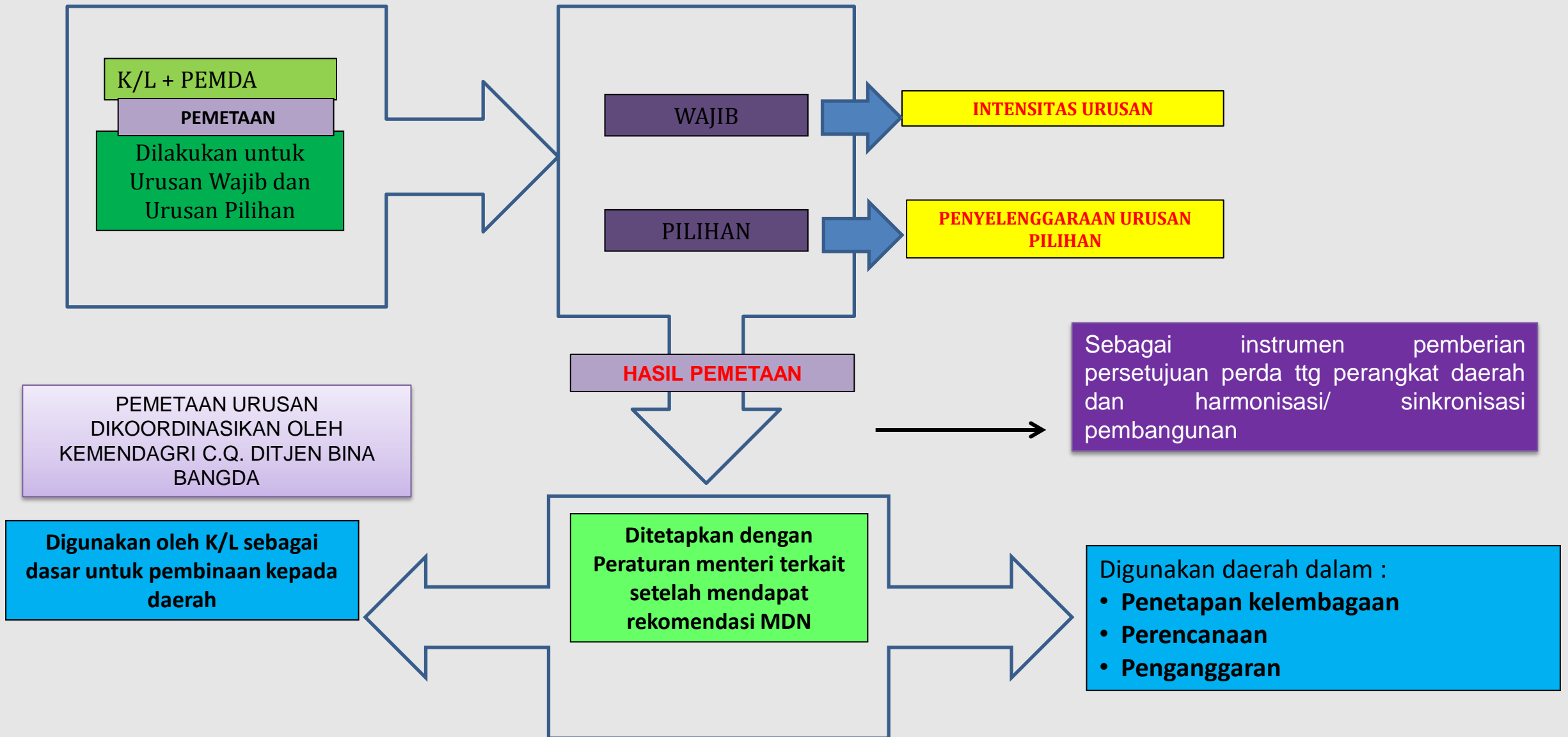
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

**PP 41 / 2007**

**PP 18 / 2016**

# PP NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

## PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN



## KRITERIA TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:

- a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
- b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).

Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah; dan
- c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

**JUMLAH TOTAL HASIL PERHITUNGAN DARI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS AKAN MENENTUKAN TIPE PERANGKAT DAERAH (TIPE A, TIPE B ATAU TIPE C)**

# KLASIFIKASI DINAS/BADAN

**Tipe  
A**

- dibentuk untuk memwadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang **BESAR (diatas 800)**

**Tipe  
B**

- dibentuk untuk memwadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang **SEDANG (601 – 800)**

**Tipe  
C**

- dibentuk untuk memwadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang **KECIL (401 – 600)**

Jumlah penduduk

Luas wilayah

Jumlah APBD

Beban Tugas utama fungsi penunjang urusan pemerintahan

## FUNGSI PENUNJANG (BADAN)

perencanaan

keuangan

Kepegawain &  
diklat

litbang

Fungsi lain

# KLASIFIKASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT,

## Tipe A

- dibentuk untuk memwadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang **BESAR (lebih dari 800)**

## Tipe B

- dibentuk untuk memwadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang **SEDANG (601-800)**

## Tipe C

- dibentuk untuk memwadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang **KECIL (kurang atau sama dengan 600)**

Jumlah penduduk

Luas wilayah

Jumlah APBD

Cakupan/Beban Tugas

# KLASIFIKASI KECAMATAN

## Tipe A

- dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang **BESAR (lebih dari 600)**

## Tipe B

- dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang **KECIL (kurang atau sama dengan 600)**

Jumlah penduduk

Luas wilayah

Jumlah Kelurahan

# HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN MALANG

**KOTA**

VARIABEL UMUM:

NO.	VARIABEL	JUMLAH	SKOR
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	881.794	80
2	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	110,06	10
3	Jumlah APBD (Rp.)	1.876.858.611.232	50
		JUMLAH	140

VARIABEL TEKNIS:

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	VARIABEL TEKNIS	VARIABEL UMUM	SKOR	DIKALIKAN 1,1,	TIPE
1	Pendidikan	680	140	820	902	A
2	Kesehatan	580	140	860	946	A
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	550	140	690	759	B
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	300	140	546	601	B
5	Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	710	140	850	935	A
6	Sosial	686	140	826	909	A
7	Tenaga kerja	700	140	840	924	A



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	VARIABEL TEKNIS	VARIABEL UMUM	SKOR	DIKALIKAN 1,1	TIPE
8	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	630	140	770	847	A
9	Pangan	640	140	780	858	A
10	Pertanahan	320	140	460	506	C
11	Lingkungan Hidup	740	140	880	968	A
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	660	140	800	880	A
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	140	-	-	-
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	596	140	736	810	A
15	Perhubungan	600	140	740	814	A

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	VARIABEL TEKNIS	VARIABEL UMUM	SKOR	DILAKIKAN 1,1	TIPE
16	Komunikasi dan Informatika	754	140	818	900	A
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	560	140	780	858	A
18	Penanaman Modal	720	140	860	946	A
19	Kepemudaan dan Olah Raga	660	140	800	880	A
20	Statistik	160	140	300	330	-
21	Persandian	160	140	300	-	-
22	Kebudayaan	580	140	720	792	B
23	Perpustakaan	612	140	752	827	A
24	Kearsipan	480	140	620	-	B
25	Kelautan dan Perikanan	140	140	280	308	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	VARIABEL TEKNIS	VARIABEL UMUM	SKOR	DIKALIKAN 1,1	TIPE
26	Pariwisata	800	140	940	1.034	A
27	Pertanian	404	140	544	598	C
28	Kehutanan	-	140	-	-	-
29	Energi Sumberdaya Mineral	-	140	-	-	-
30	Perdagangan	560	140	700	770	B
31	Perindustrian	800	140	940	1.034	A
32	Transmigrasi	-	140	-	-	-

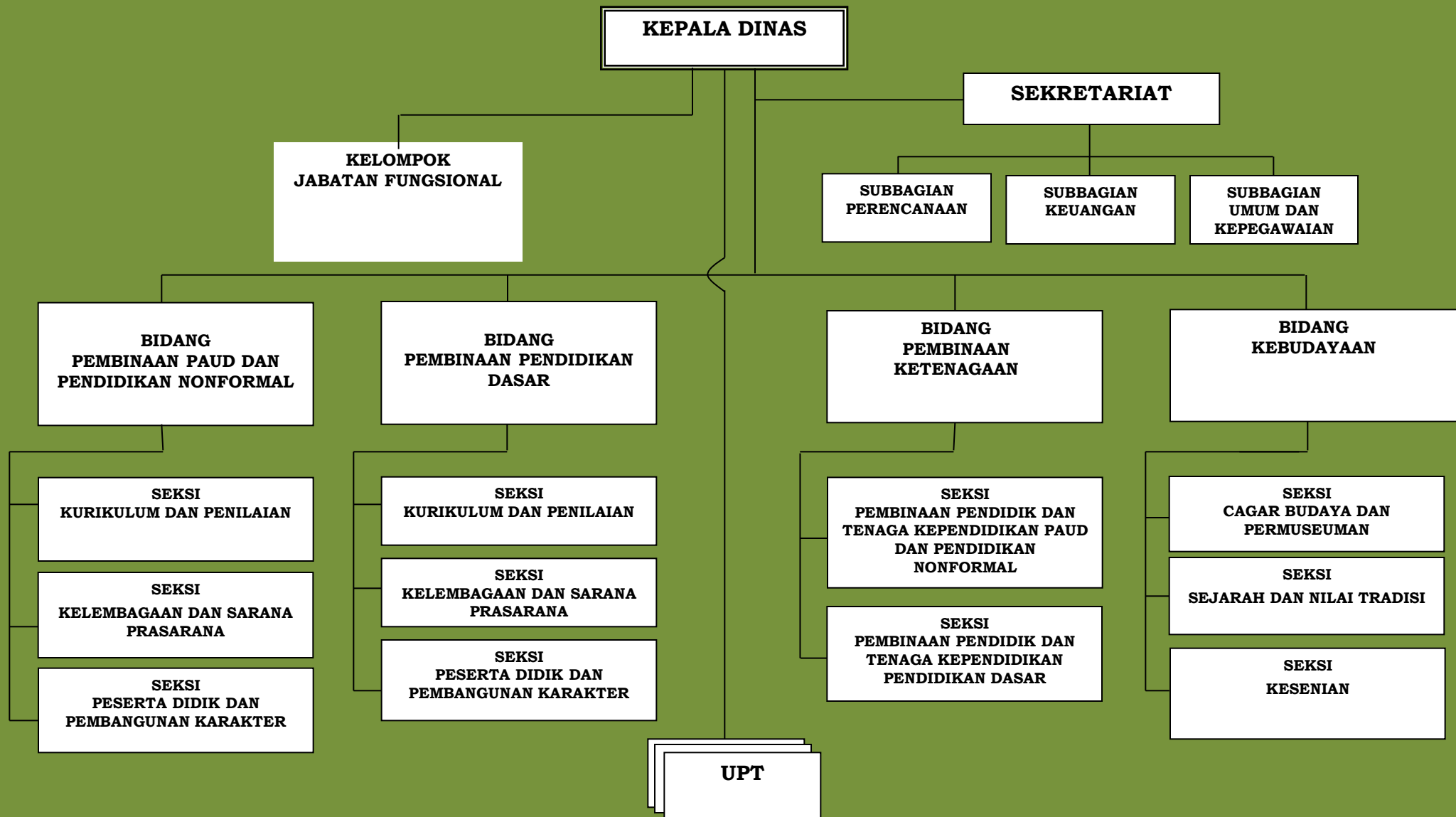
## PENATAAN PERANGKAT DAERAH (PERDA NO. 5 TAHUN 2019)

NO.	PERANGKAT DAERAH	RESTRUTURISASI PERANGKAT DAERAH		UPT		
1.	Dinas Pendidikan	1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.	Satuan Pendidikan Dasar	A
2.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			2.	Satuan Pendidikan Nonformal (SKB)	A
				3.	Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	B
3.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.	Pengolahan Air Limbah Daerah	B
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			5.	Laboratorium Pengujian Konstruksi	B
				6.	Rumah Susun Sewa (Rusunawa)	B
6.	Dinas Sosial	4.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
8.	Dinas Tenaga Kerja	5.	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					

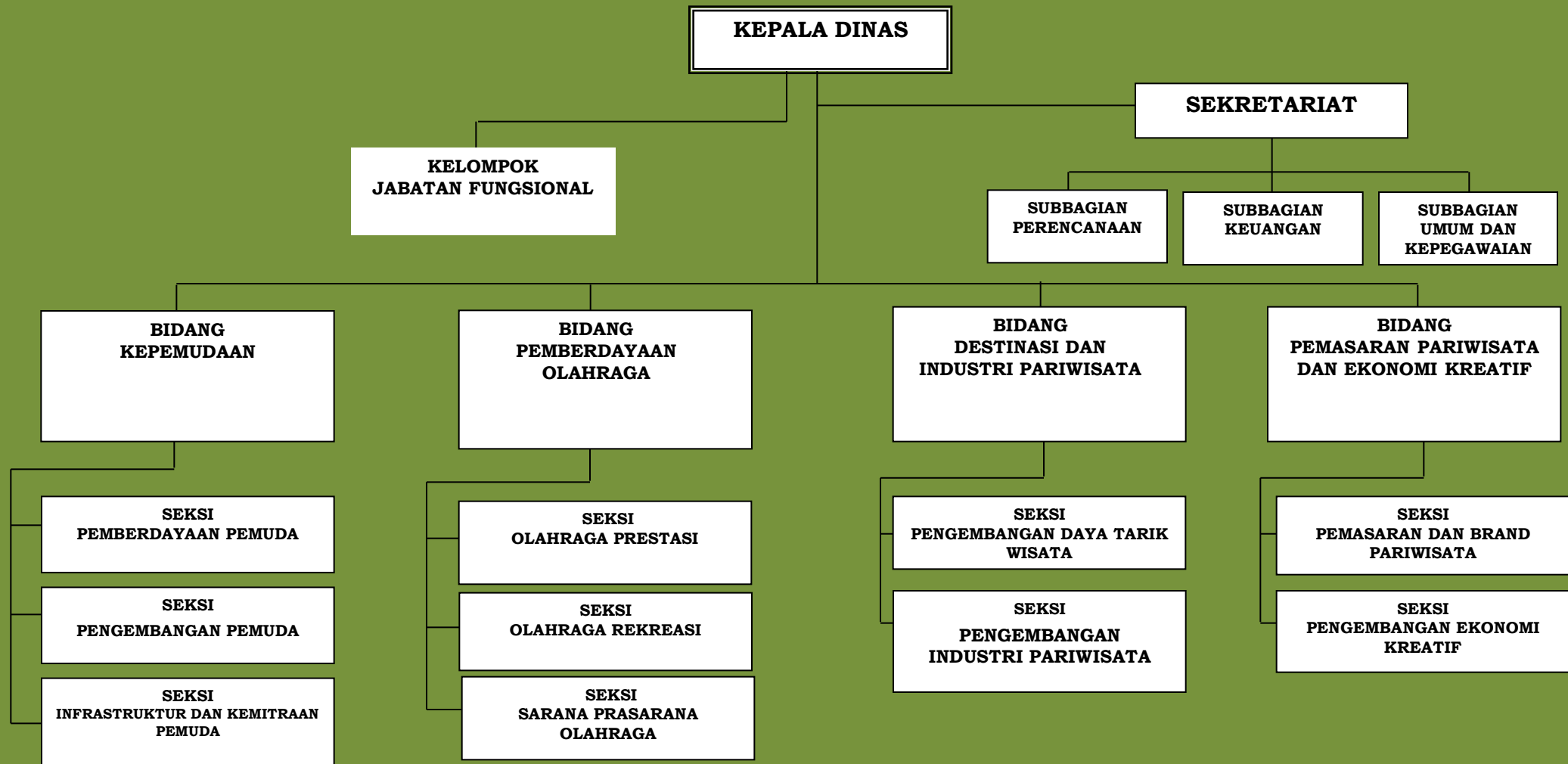
NO.	PERANGKAT DAERAH	RESTRUTURISASI PERANGKAT DAERAH	UPT		
10.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	7.	Pasar	B
11.	Dinas Perindustrian		8.	Metrologi Legal	
12.	Dinas Perdagangan				
13.	Dinas Lingkungan Hidup	7. Dinas Lingkungan Hidup	9.	Laboratorium Lingkungan	B
	Bidang Taman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		10.	Pengelolaan Sampah	B
			11.	Pengelolaan Taman	B
			12.	Pengelolaan Pemakaman Umum	B
14.	Satpol PP	8. Satpol PP	13.	Pemadam Kebakaran	B
15.	Dinas Perhubungan	9. Dinas Perhubungan	14.	Pengelolaan Prasarana Perhubungan	

NO.	PERANGKAT DAERAH	RESTRUTURISASI PERANGKAT DAERAH		UPT		
16.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.	Dinas Komunikasi dan Informatika			
18.	Kesehatan	12.	Kesehatan	15.	<i>Puskesmas</i>	<i>A</i>
				16.	<i>Laboratorium Kesehatan Daerah</i>	<i>B</i>
				17.	<i>RSUD</i>	<i>-</i>
19.	Barelitbang	13.	BAPPEDA			
20.	BPKAD	14.	BKAD			
21.	BP2D	15.	Badan Pendapatan Daerah			
22.	BKD	16.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			
23.	BAKESBANGPOL	17.	BAKESBANGPOL			
24.	Sekretariat Daerah	18.	Sekretariat Daerah			
25.	Seretariat DPRD	19.	Seretariat DPRD			
26.	Kecamatan	20.	Kecamatan			
27.	Inspektorat	21.	Inspektorat			
28.	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	22.	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah			
29.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
30.	BPBD	24.	BPBD			

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

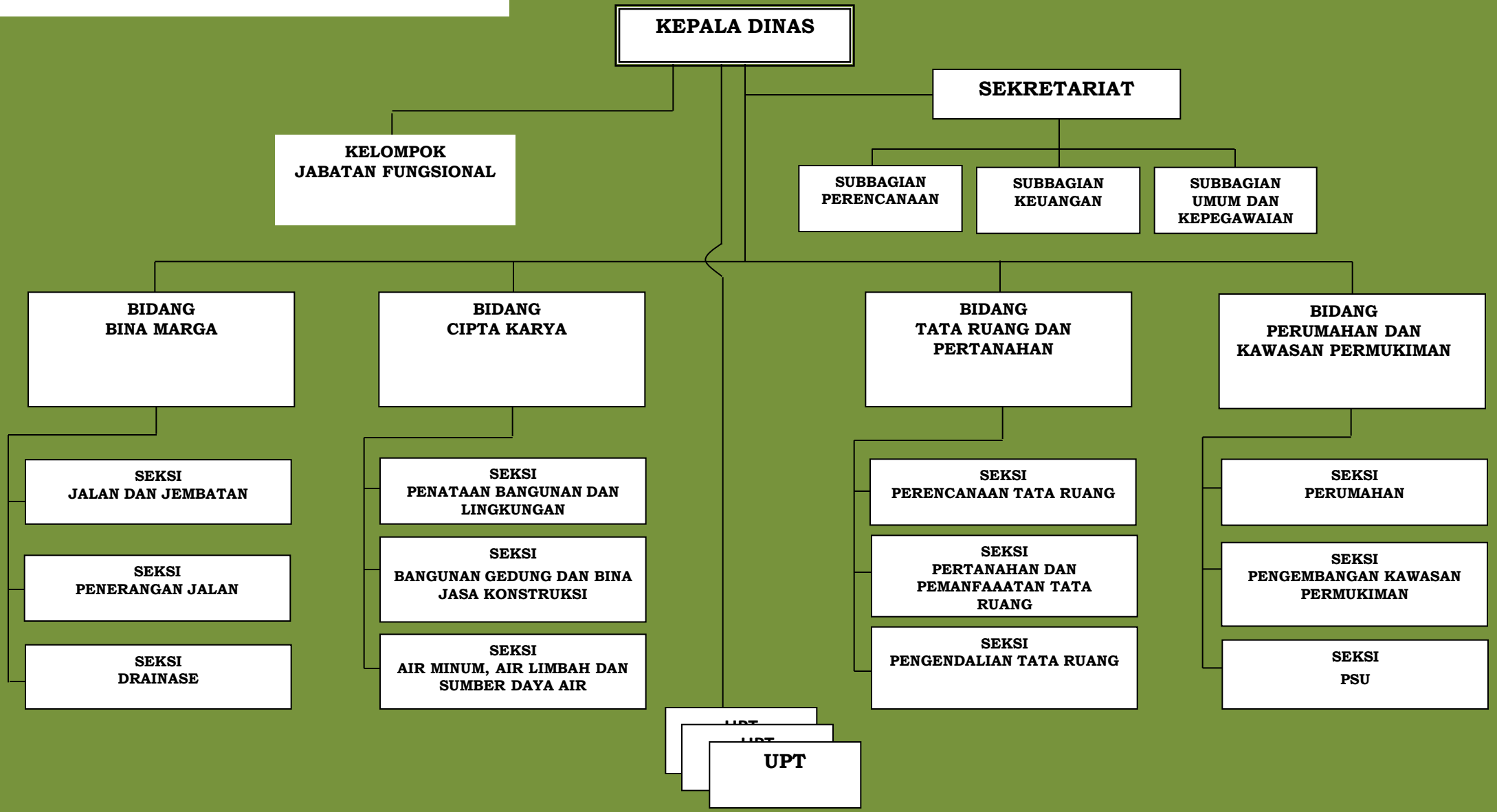


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

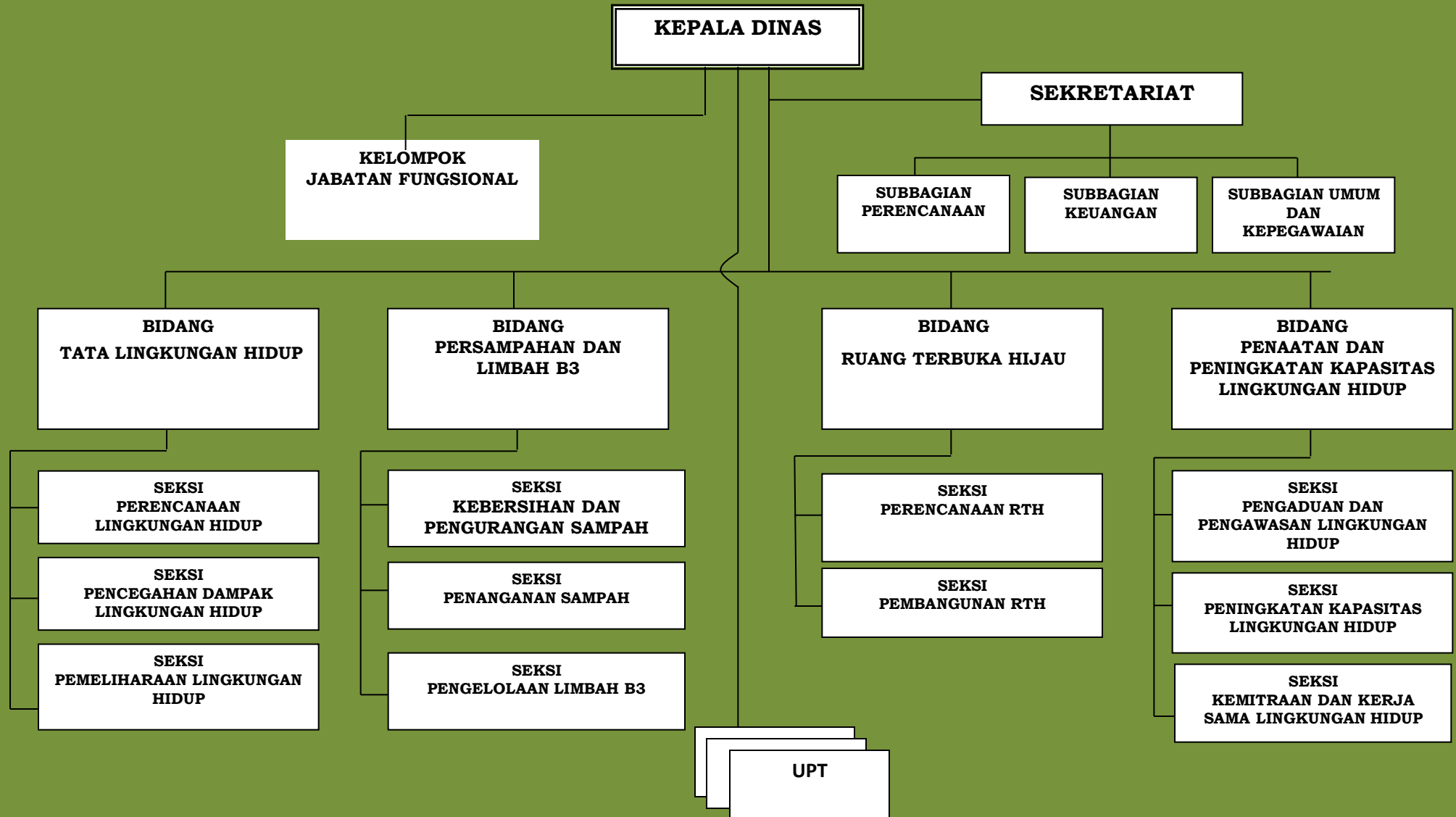




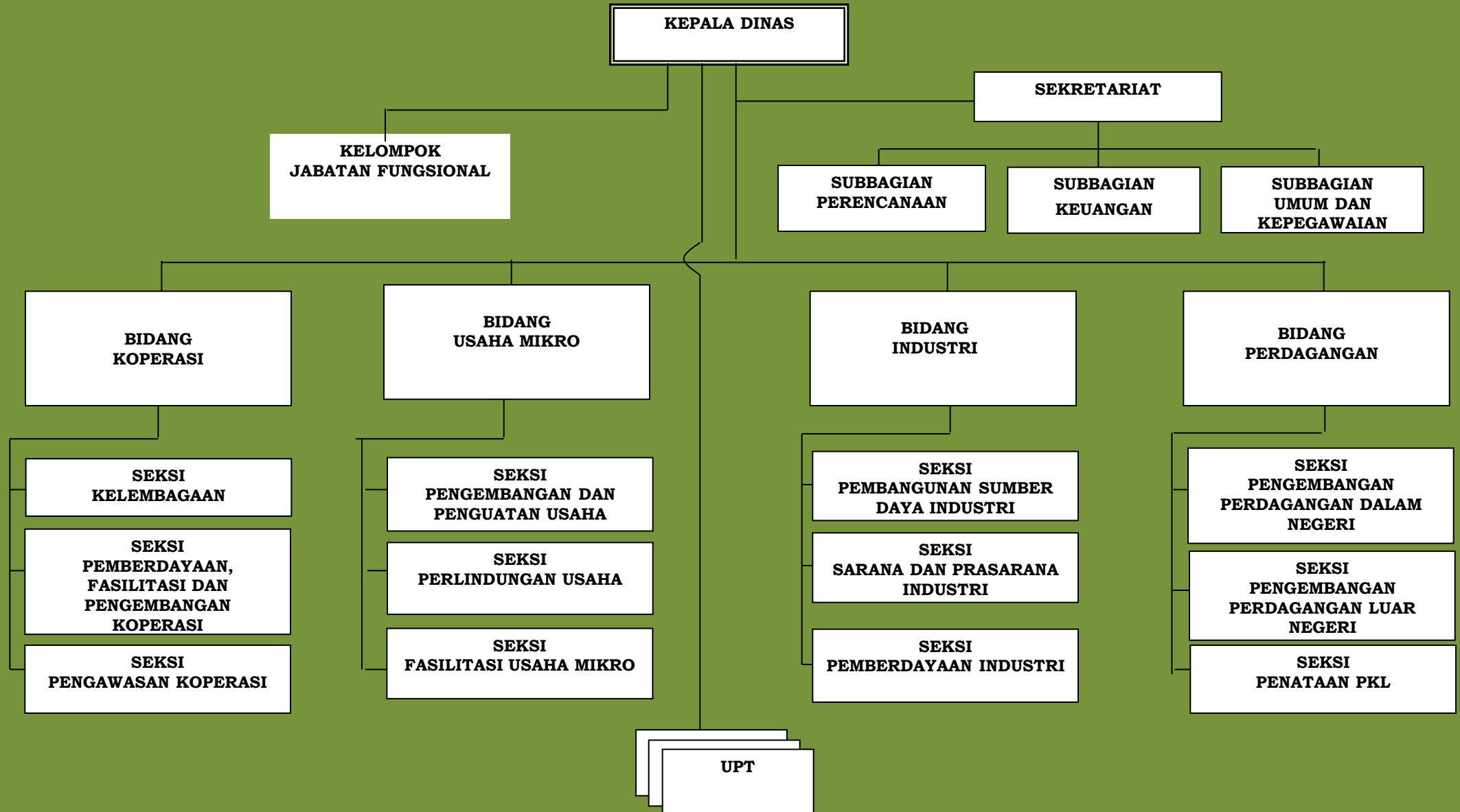
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
(DPUPR PERKIM)**



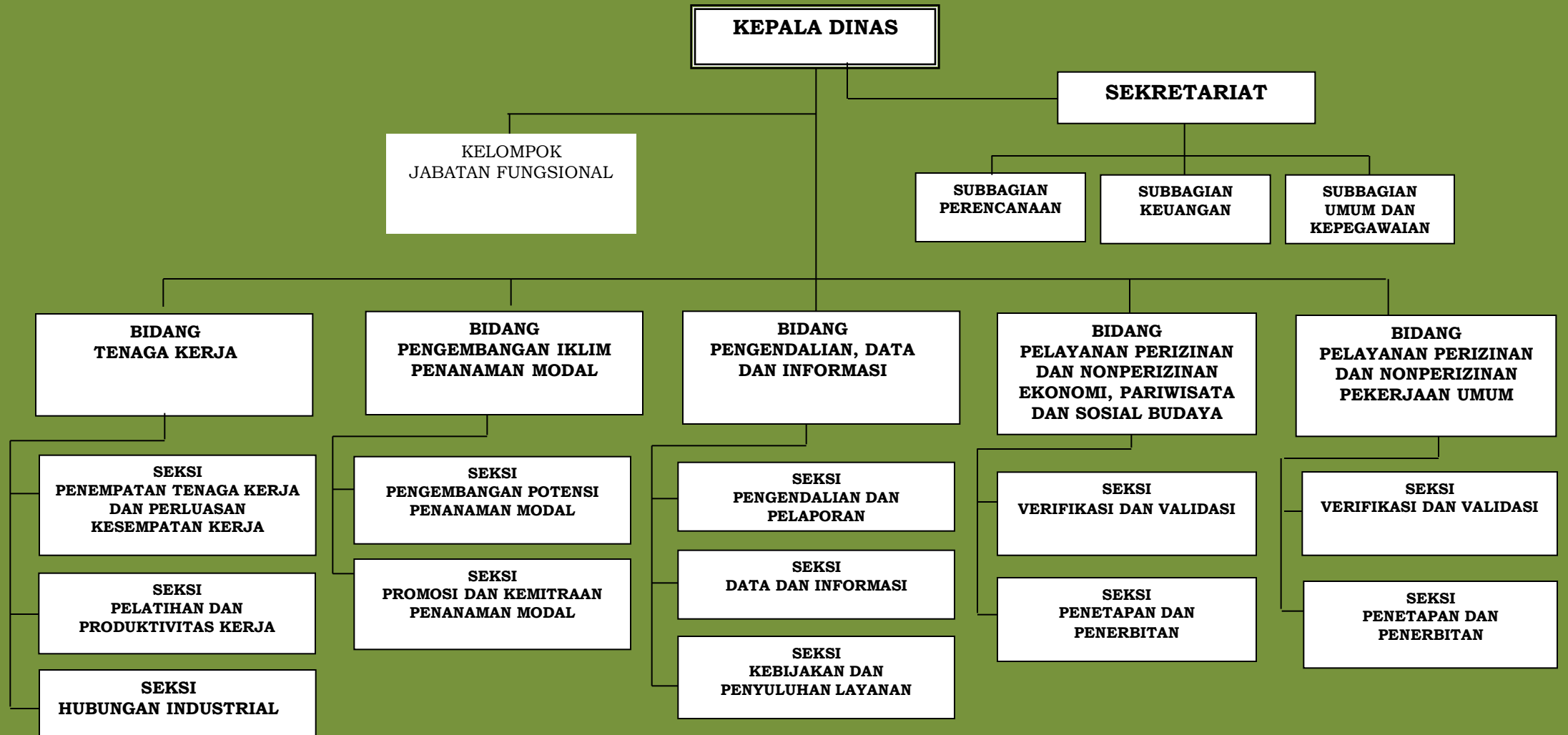
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



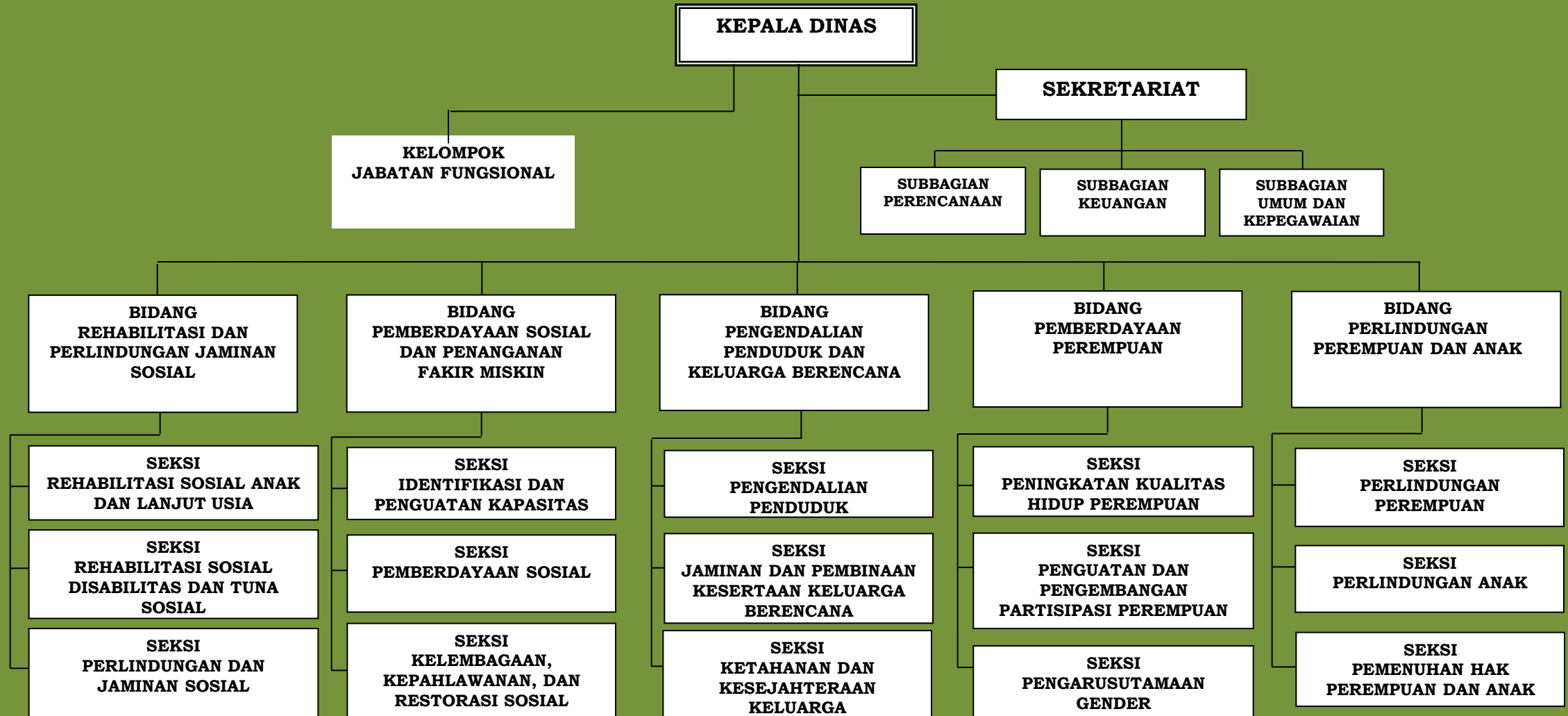
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
(KOPINDAG)**



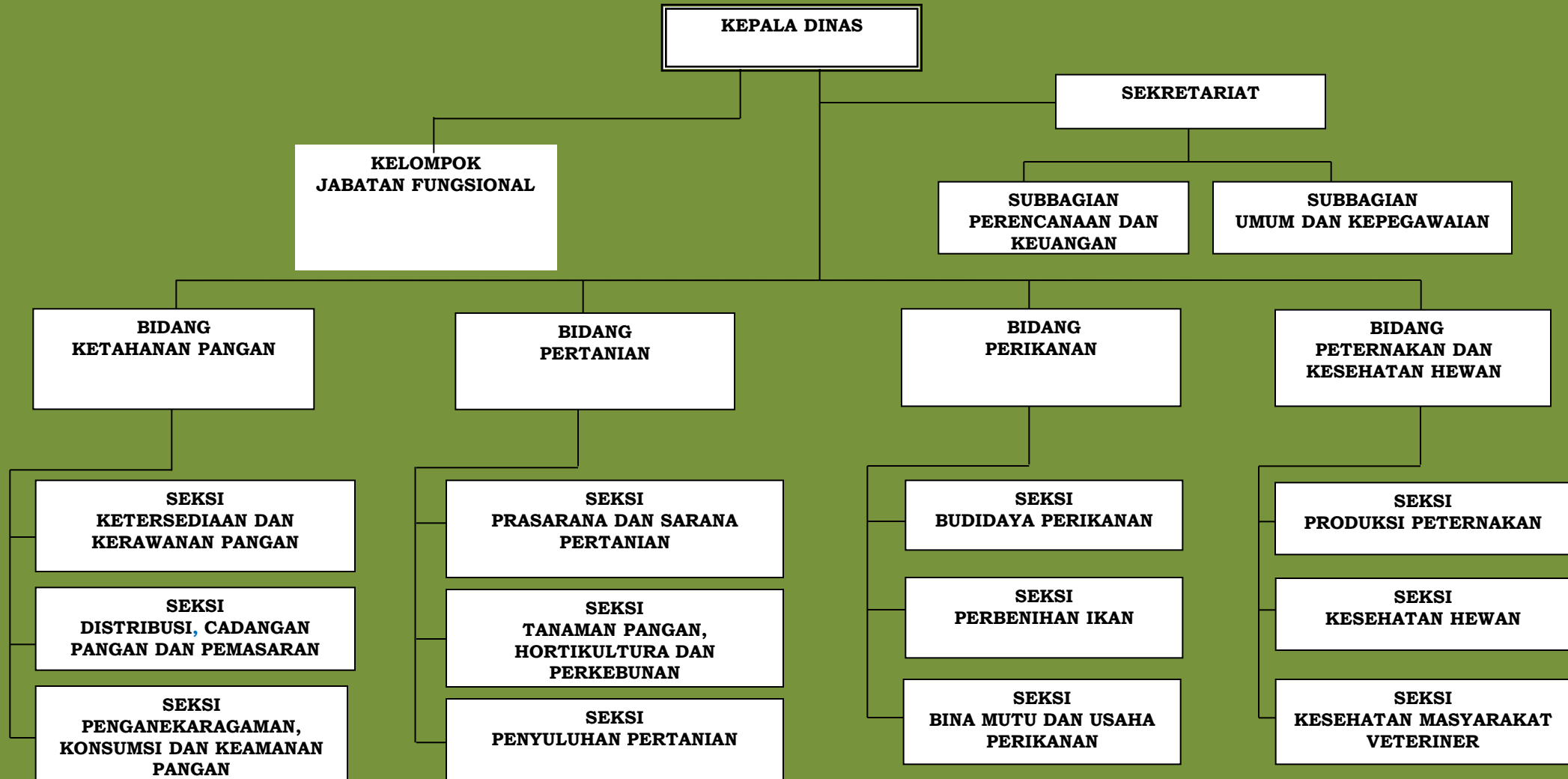
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PTSP**



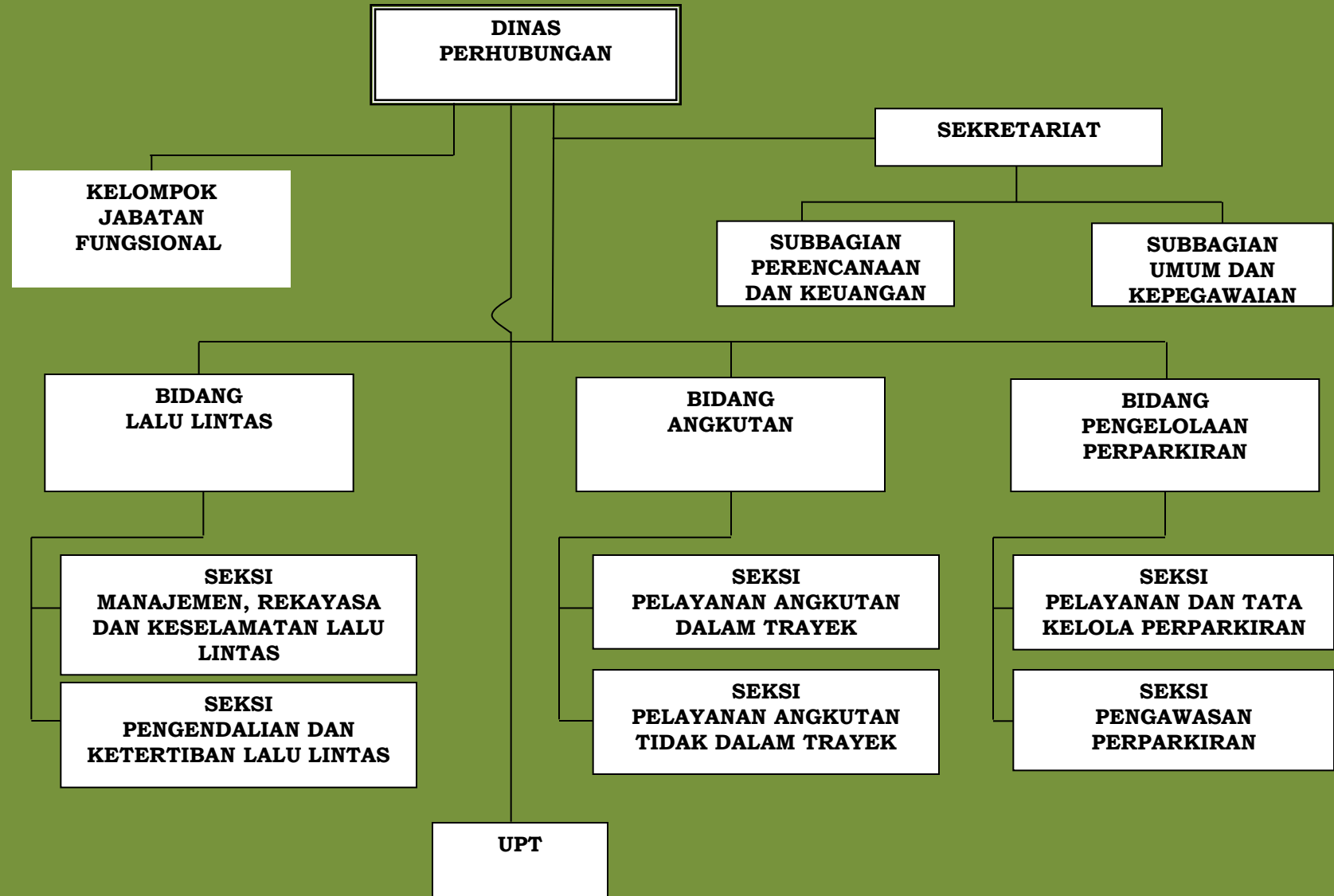
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**



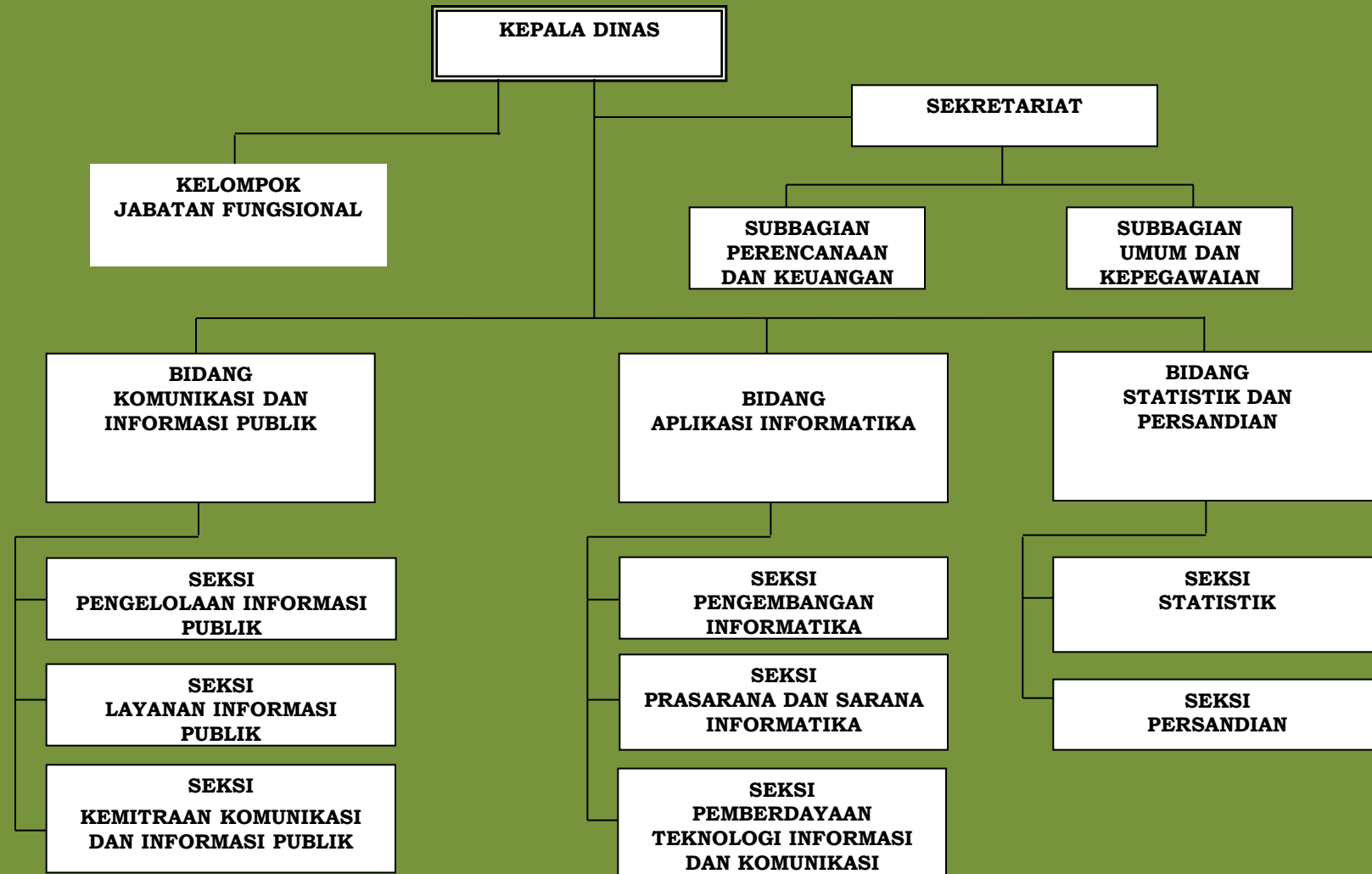
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN**

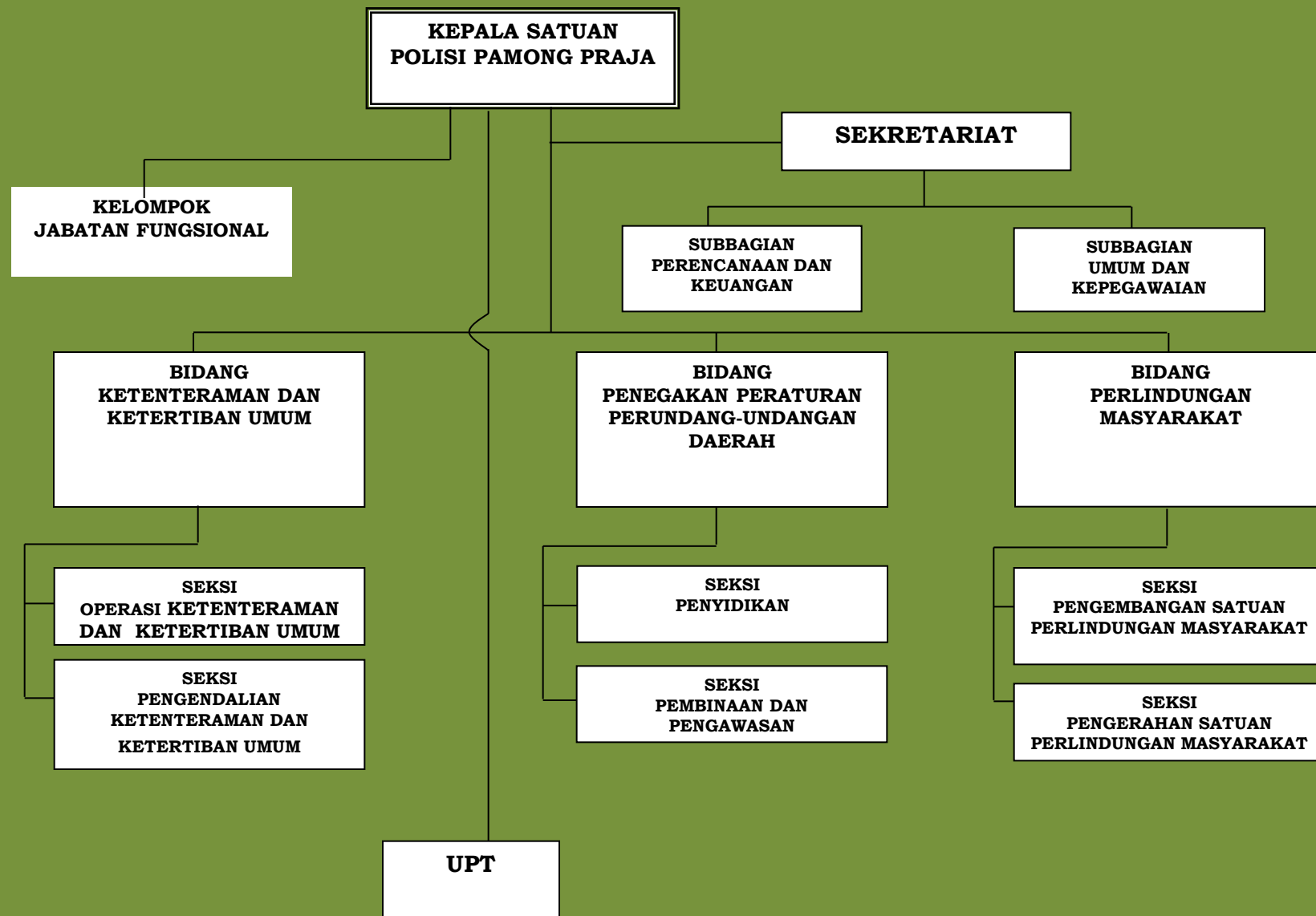


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

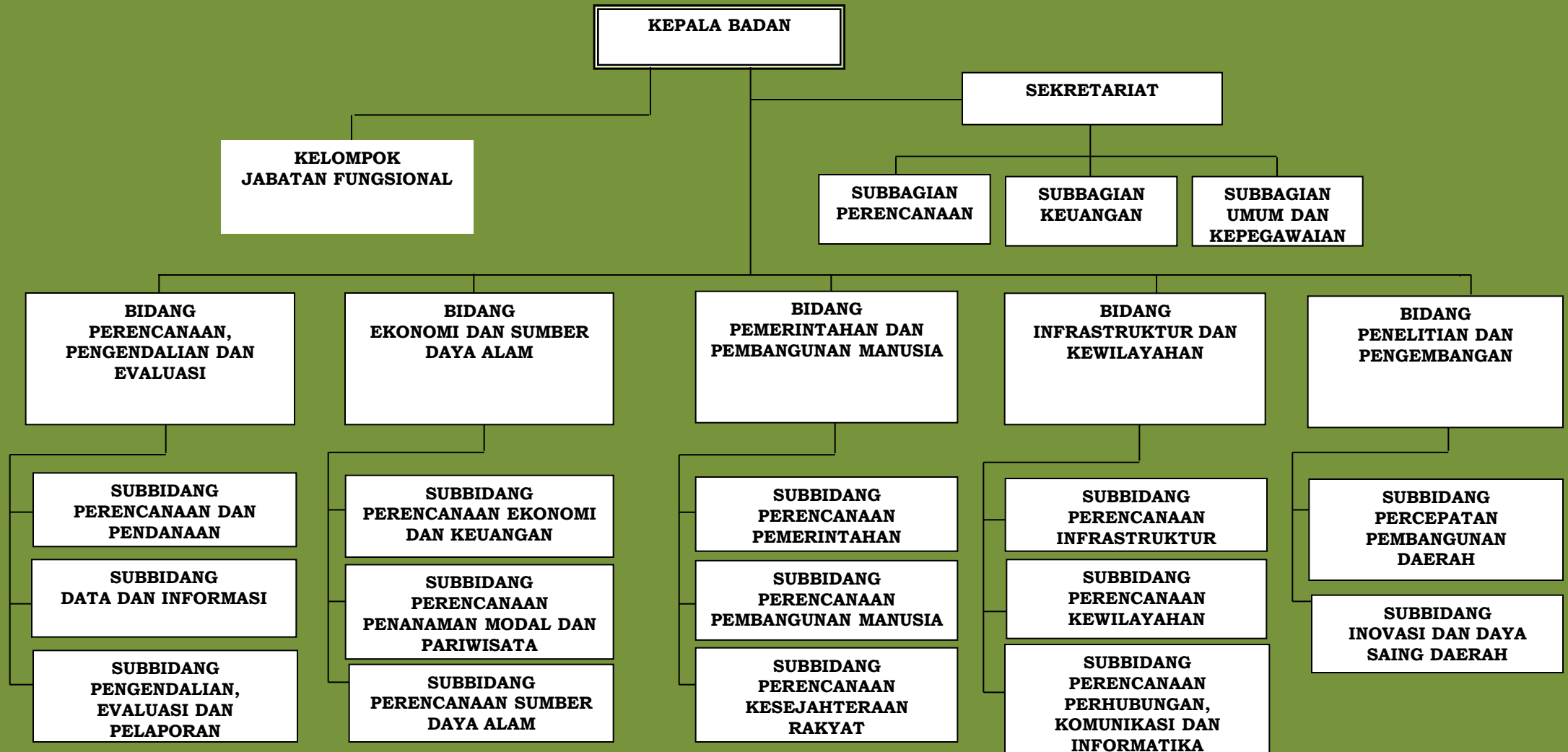




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



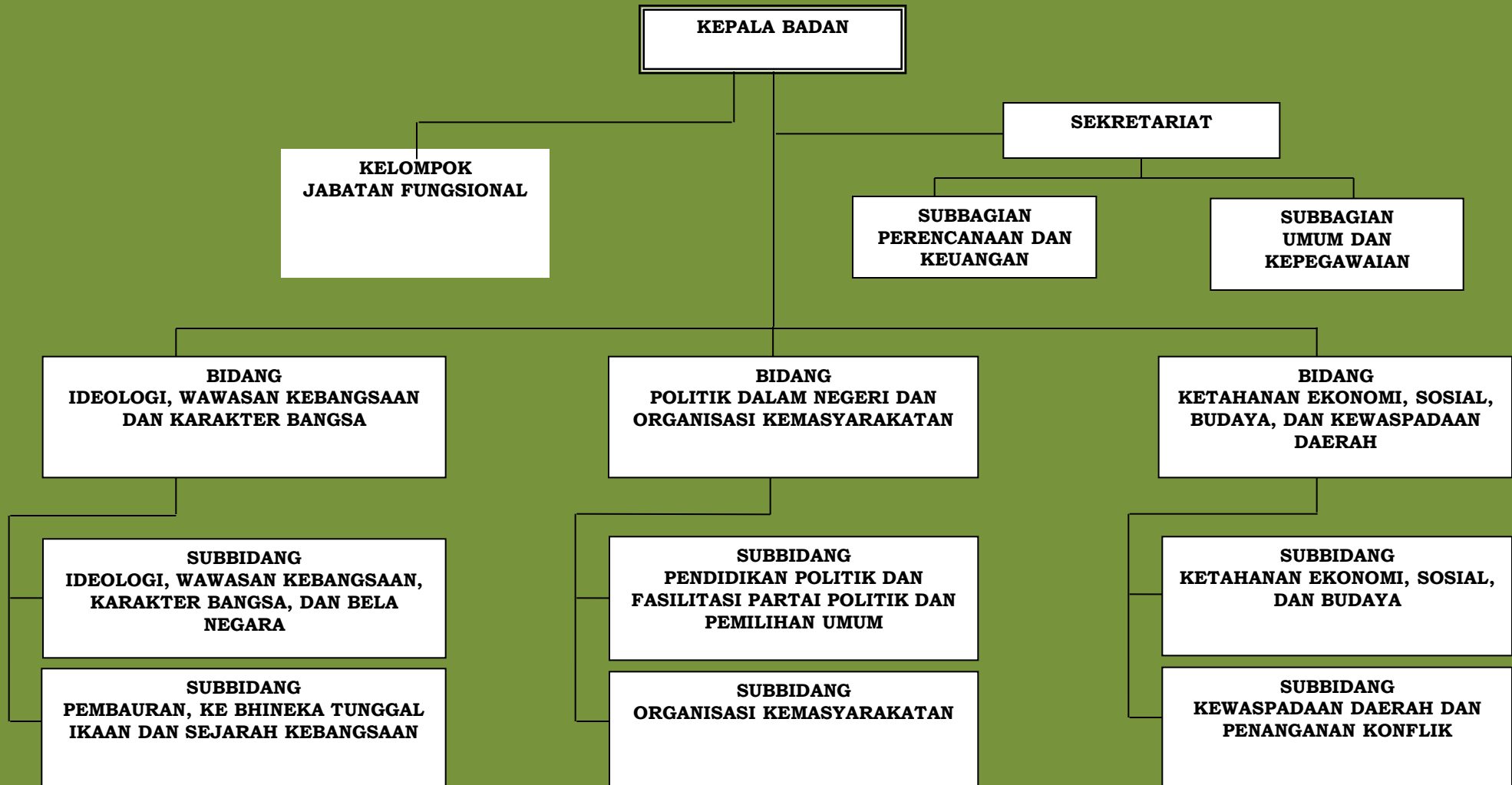
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

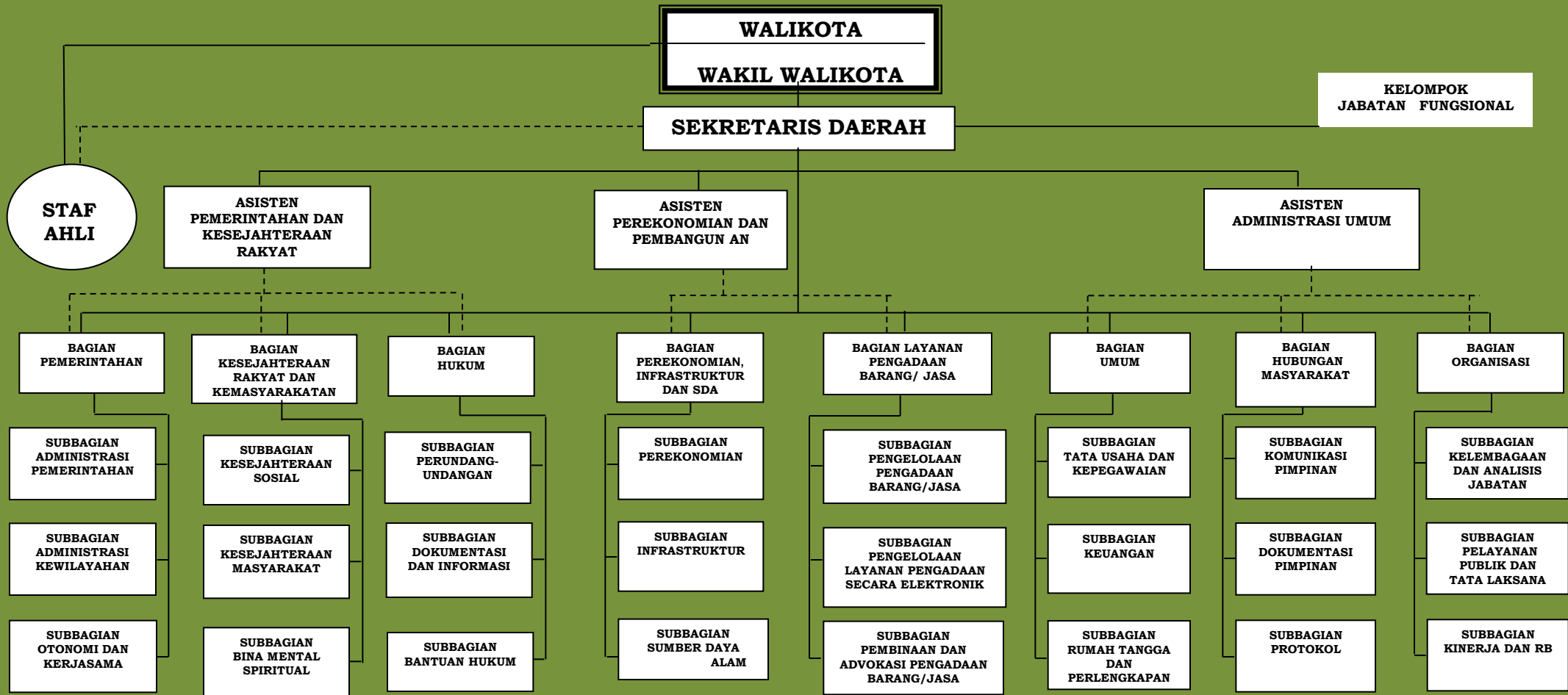


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

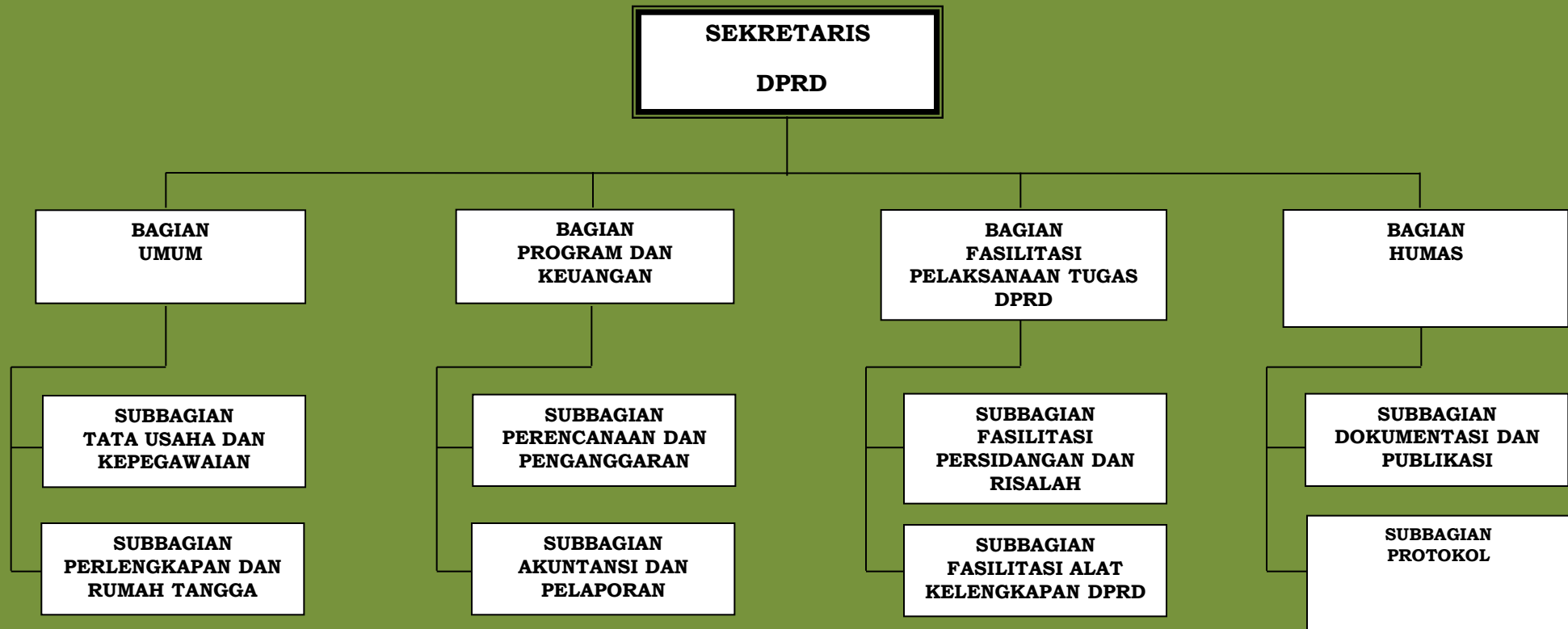


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

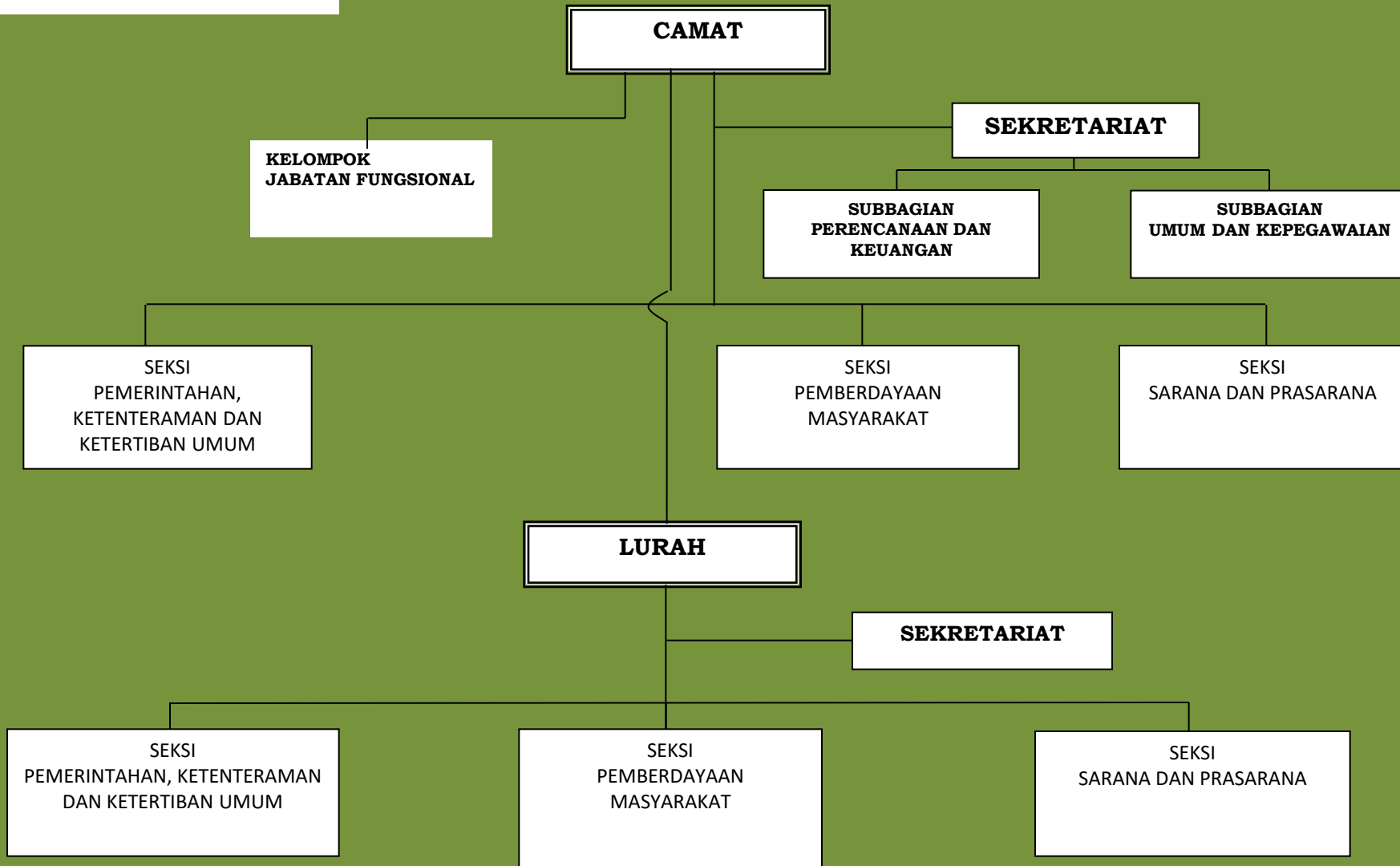




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN**



## REKAPITULASI JABATAN STRUKTURAL

ESELON	EKSISTING	BERKURANG	RESTRUKTURISASI
II.a	1	0	1
II.b	34	6	28
III.a	49	8	41
III.b	100	21	79
IV.a	439	85	354
IV.b	268	0	268
<b>JUMLAH</b>	<b>891</b>	<b>120</b>	<b>771</b>



# TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Disusun berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sektoral

Berpedoman:

PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dari Kementerian atau Lembaga Tinggi.

RANPERWAL	JUMLAH
PERANGKAT DAERAH	23
U P T	17
JUMLAH	40

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diundangkan tanggal 12 Agustus 2019

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 paling lama 3 (tiga) bulan Perwal Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sudah ditetapkan

Kurun waktu (3 (tiga) bulan) 12 Agustus s.d. 11 November 2019;

**Antisipasi penyelesaian penyusunan Renstra dan Ranperwal Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Kita tarik mundur dari:**

- **Penetapan APBD paling lambat di akhir bulan Desember 2019;**
- **Persetujuan DPRD tentang APBD paling lambat akhir bulan November 2019;**
- **Maka Renstra Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat pertengahan bulan November 2019;**
- **Perwal Tusi ditetapkan paling lambat tanggal 11 November 2019;**



**TERIMA KASIH**

